

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

##### **1.1.1 Pola Gerakan Sosial dalam Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas**

Sebagai proyek kebijakan oleh pemerintah, rencana tambang batu andesit di Desa Wadas memang menjadi satu kesatuan dengan pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, rencana pertambangan batu andesit di Desa Wadas justru banyak dipandang sebagai kebijakan yang memfasilitasi kepentingan di luar kesejahteraan warga Wadas sebagai pihak yang terdampak rencana pertambangan. LBH Yogyakarta sebagai lembaga pendamping warga Wadas yang justru melihat proyek tambang batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener bersama dengan Yogyakarta *International Airport* dan PLTU Cilacap sebagai Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk menyokong wacana Borobudur yang masuk dalam proyek 10 Bali Baru oleh pemerintah.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan narasi membangun ekonomi negara melalui serangkaian kebijakan Proyek Strategis Nasional yang dibawa oleh pemerintah karena justru memunculkan dampak buruk pada masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, banyaknya temuan perihal kecacatan dalam dokumen AMDAL pembangunan Bendungan Bener yang menjadi satu kesatuan dengan rencana tambang di Desa Wadas baik secara prosedural maupun substansi semakin menunjukkan tidak adanya perencanaan yang baik

oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuatnya.

Pertanyaan soal rencana pertambangan termasuk di dalamnya segala risiko terkait aktivitas tambang yang akan dijalankan tidak pernah warga Wadas dapatkan jawabannya sejak pertama kali adanya sosialisasi hingga saat ini. Hal tersebut yang kemudian memunculkan sikap penolakan oleh warga Wadas sebagai respons yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang. Sikap menolak oleh warga Wadas bahkan telah ditunjukkan sejak sosialisasi pertama kali terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener oleh BBWS Serayu Opak pada 27 Maret 2018.

Gerakan menolak tambang batu andesit telah berkembang semakin besar seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat bukan hanya para laki-laki tetapi juga para perempuan Wadas juga telah berkontribusi secara aktif dalam gerakan mengingat menempati posisi sebagai kelompok yang paling rentan akan dampak dari adanya rencana tambang. Selain menempuh upaya litigasi, jalur-jalur non-litigasi juga telah banyak digunakan warga Wadas dalam memperbesar peluang untuk memenangkan gerakan menolak tambang. Salah satu momentum yang dimanfaatkan adalah banyaknya peluang politik yang hadir bagi gerakan menolak tambang.

Dimulai dari momentum pemilihan Kepala Desa Wadas pada 2019 silam hingga majunya Gubernur Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presiden di Pemilu 2024 di mana keduanya menjadi salah dua di antara aktor-aktor yang terlibat dalam masuknya rencana tambang batu andesit di Desa Wadas. Kemudian, warga Wadas juga menggunakan nilai timbal balik yang

tebal (*thick reciprocity*) sebagai salah satu motif dalam mempertahankan lahannya agar tidak jatuh ke dalam rencana tambang.

Lestarinya alam di Desa Wadas merupakan warisan para orang tua dan leluhur yang dijaga dan dirawat oleh warga Wadas sebagai sebuah wasiat. Kemampuan warga Wadas untuk membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai timbal balik yang tebal (*thick reciprocity*) adalah modal sosial yang sama yang digunakan dalam membangun solidaritas untuk melampaui perpecahan sosial yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya dukungan untuk solidaritas yang datang dari banyak kelompok lapisan masyarakat untuk perjuangan warga Wadas.

Warga Wadas bersama pendamping dan solidaritas telah membangun kesadaran bahwa gerakan sosial serangkaian dinamika yang dihadapi berjalan sebagai sebuah fenomena politik. Permasalahannya, gerakan sosial di dalam arena politik selalu menempati posisi yang tidak diuntungkan. Pemerintah sebagai entitas yang memegang sumber justru menggunakan kekuatan struktural dan instrumentalnya untuk membebankan segala bentuk kerugian kepada warga Wadas.

Warga Wadas menggunakan relasi sejarah, lingkungan, pengetahuan, serta nilai religius-spiritualitasnya dalam menciptakan *interdependent power* untuk memenangkan konsesi. Namun, usaha gerakan sosial di Desa Wadas dalam meningkatkan posisi tawarnya dihadapkan pada kemungkinan terburuk sebagai konsekuensinya. Sikap menolak warga Wadas yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang justru dibalas dengan tindakan represif yang dilakukan oleh

aparatus selama proses pembebasan lahan.

Warga Wadas yang bertahan untuk menolak rencana tambang batu andesit di Desa Wadas bersama dengan relasi sejarah terhadap lingkungan serta nilai, pengetahuan, dan religius-spiritualitasnya nyatanya tak menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pertambangan di Desa Wadas. Tindakan intimidasi dan represi sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah telah membatalkan agitasi yang dilakukan warga Wadas selama bertahun-tahun menggunakan nilai dan tradisi untuk memenangkan perlindungan terhadap ruang hidup dari agenda tambang batu andesit di Desa Wadas.

Hal tersebut bisa dilihat dengan semakin terpusatnya gerakan menolak tambang di Desa Wadas yang jumlahnya kian mengecil dari yang sebelumnya berada pada persentase 75% pada awal gerakan penolakan hingga sekarang tersisa hanya sekitar 30%. Bentuk pendekatan yang demikian dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada munculnya konflik vertikal antara warga Wadas dengan pemerintah tetapi juga konflik horizontal antar warga Wadas itu sendiri.

### **1.1.2 Pengaruh Faktor-Faktor di Lapangan dalam Mendorong maupun Menghambat Gerakan Sosial dalam Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas**

Tindakan represi dan intimidasi oleh pemerintah kepada warga Wadas terutama yang terjadi pada 23 April 2021 dan 8 Februari 2022 telah memukul mundur gerakan menolak rencana tambang dan menyisakan trauma yang membekas di ingatan warga Wadas. Kejadian yang sama juga menjadi

penanda dimulainya perpecahan di dalam tubuh gerakan menolak rencana tambang di Desa Wadas. GEMPADEWA sebagai motor gerakan menolak tambang batu andesit di Desa Wadas pada awalnya digagas para generasi muda Desa Wadas sebagai wadah yang menyatukan warga Wadas Atas dan Wadas Bawah di dalam satu sikap penolakan yang sama terhadap rencana tambang di Desa Wadas.

Intimidasi dan represi yang terus digunakan sebagai pendekatan dalam pembebasan lahan oleh pemerintah berimbas pada gelombang peralihan sikap warga Wadas yang sebelumnya kontra menjadi pro tambang tak terbandung. Puncaknya, Insin Sutrisno yang sebelumnya merupakan ketua GEMPADEWA masuk dalam gelombang peralihan sikap warga Wadas menjadi kelompok pro tambang dengan menyerahkan sertifikat lahannya bersama dengan beberapa warga lainnya.

Situasi tersebut telah berdampak buruk dalam relasi sosial yang terjalin antara warga Wadas karena dilihat sebagai sebuah pengkhianatan terhadap gerakan. Gagasan generasi muda Wadas untuk menyatukan warga Wadas Atas dengan warga Wadas Bawah yang telah terpisah secara wilayah dalam waktu yang lama menjadi gugur sebelum terwujud. Faktor organisasi dan kepemimpinan tersebut telah menjadi isu internal gerakan penolakan tambang di Desa Wadas yang turut memberikan andil dalam terpecahnya gerakan. Di sisi lain, faktor ekonomi dan politik turut menjadi motif yang digunakan baik oleh warga Wadas yang masih kontra terhadap rencana tambang maupun warga Wadas yang berada dalam sikap pro terhadap rencana tambang.

Ganti rugi merupakan contoh dari faktor ekonomi yang berpengaruh cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan warga terutama bagi mereka yang telah mengambil sikap pro terhadap tambang dengan menyerahkan lahannya kepada pihak pemrakarsa. Di sisi lain, sekalipun tanpa adanya ganti rugi untuk tambang, warga Wadas yang masih bertahan mengaku dari aktivitas yang dilakukan di lahan tersebut tetap menghasilkan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Argumen tersebut sekaligus digunakan oleh warga Wadas untuk menepis keraguan publik terhadap kemurnian gerakan menolak tambang di Desa Wadas. Warga Wadas telah menunjukkan tumbuhnya gerakan tersebut organik dan tidak diboncengi kepentingan pihak mana pun selain keinginan warga Wadas untuk melindungi kelestarian alam Desa Wadas itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian warga untuk terus merawat gerakan baik ketika belum adanya pendampingan di awal gerakan hingga hari ini ketika warga Wadas telah bergerak bersama lembaga pendamping dan solidaritas lainnya.

Warga Wadas juga telah secara mandiri membuat dan mengelola akun @wadas\_melawan sebagai media alternatif dalam memberikan kabar garis depan dari perkembangan kasus yang terjadi di Wadas. Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya media arus utama yang tidak berpihak kepada warga Wadas. Di dalam hal ini, keberpihakan menjadi penting untuk memperkuat posisi gerakan dalam menjaga peluangnya memenangkan tujuan. *Timeline* media yang dipenuhi oleh berita-berita yang tidak berpihak ke warga Wadas hanya akan semakin menyudutkan posisi warga baik di mata

publik maupun pemerintah dan pihak pemrakarsa.

Sebagai catatan untuk penelitian ini, masyarakat memang telah tumbuh sebagai entitas yang mengerti terkait bagaimana dan kapan harus melindungi dirinya sendiri (Block dan Somers, 1984). Akan tetapi, formulasi gerakan ganda (*double movement*) Polanyi yang digunakan peneliti dalam hal ini melekat padanya sebuah kritik karena mereifikasi entitas abstrak yang disebut masyarakat itu sendiri. Sebagai gerakan tandingan (*counter movement*) dari logika ekonomi pasar, masyarakat dilihat sebagai agen yang tidak dapat selalu diasosiasikan dengan hitung-hitungan ekonomi.

Seperti yang bisa dilihat dalam kasus Wadas, gerakan menolak tambang batu andesit memang memunculkan faktor ekonomi sebagai pengaruh dalam warga menentukan sikap. Akan tetapi, faktor ekonomi bukan merupakan faktor satu-satunya yang memengaruhi warga Wadas dalam mengambil sikap terhadap rencana tambang yang ada. Hal tersebut dapat dijelaskan mengingat terbaginya sikap warga Wadas menjadi pihak pro dan kontra disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; tidak dilibatkannya warga Wadas dalam proses perencanaan tambang, adanya cacat prosedur dan substansi dalam dokumen AMDAL yang berpotensi mengancam kelestarian alam Desa Wadas, serta rasa takut dan trauma akibat intimidasi dan tindak represi yang dilakukan pemerintah bersama dengan aparat.

Di dalam kasus Wadas ketimpangan memang telah terjadi sejak awal. Warga Wadas yang berhadapan dengan pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas hadirnya Proyek Strategis Nasional membuat segala kerugian yang ada dibebankan pada pundak warga Wadas. Sulit rasanya

membayangkan terwujudnya keseimbangan elemen antara masyarakat sipil dan pemerintah jika ditempuh dengan cara penegakkan hukum bagi kedua entitas tersebut. Rasa adil yang selama ini masih belum hadir pada masyarakat sipil disebabkan oleh tindakan pemerintah sebagai representasi negara telah banyak menerobos bahkan membuat serangkaian peraturan yang hanya berpihak pada segelintir individu maupun kelompok tertentu.

## **1.2 Saran**

Melihat garis besar gerakan menolak tambang batu andesit di Desa Wadas yang mengarah pada gerakan perlindungan (*protective movement*), penting untuk diketahui terlebih dahulu capaian yang warga ingin tuju dari adanya gerakan tersebut. Di dalam proses pendampingan, hal tersebut sering dikenal sebagai advokasi yang berbasis kepada masyarakat. Di dalam kasus Wadas, rencana pertambangan batu andesit di Desa Wadas memang menjadi satu kesatuan dengan rencana pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Hal tersebut yang membuat seharusnya bukan hanya rencana tambang batu andesit yang mengalami penolakan tetapi juga rencana pembangunan Bendungan Bener itu sendiri.

Namun demikian, melihat banyaknya dampak buruk yang berpotensi secara langsung dirasakan warga Wadas disebabkan oleh adanya rencana tambang batu andesit di Desa Wadas, akhirnya menumbuhkan kesadaran warga untuk menolak hanya sejauh pada rencana tambang batu andesit. Eskalasi di dalam gerakan memang sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kesadaran dari warga sebagai agen dalam pergerakan. Sebagai prioritas,

kepentingan yang ingin dicapai warga terdampak merupakan hal yang terpenting untuk diamankan terlebih dahulu. Setelahnya, eskalasi gerakan dapat ditingkatkan dengan membangun kesadaran warga melalui serangkaian pendidikan kritis agar dapat meningkatkan pemahaman yang ingin dicapai bersama.

Di dalam hal ini lembaga pendamping maupun solidaritas yang ada dituntut untuk dapat secara selaras bersama warga menghadapi dinamika gerakan yang terjadi. Keniscayaan akan adanya reorganisasi dalam gerakan sebagai salah satu bentuk dari dinamika di internal gerakan harus dipastikan dapat mengejar progresi yang sudah dibuat, bukan justru mengulang maupun membangun jalur perjuangan baru. Dalam hal ini, intrik gerakan di dalam internal organisasi memang harus diatasi sebagai syarat agar gerakan dapat berkelanjutan dan berumur panjang.

Di samping itu, gerakan yang selama ini dibangun dengan melibatkan solidaritas dan lembaga pendamping sering kali masih belum berhasil melewati dinamika gerakan dengan baik. Salah satu faktor yang cukup krusial adalah tidak adanya rencana strategis gerakan yang disepakati dan dijalankan bersama. Setiap konsolidasi gerakan akan menghasilkan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang selama ini tidak pernah bergerak lebih jauh dikarenakan minimnya tindak lanjut.

Perlu adanya kesadaran dalam melihat gerakan sosial sebagai fenomena politik yang berarti tidak dapat memisahkan gerakan dari keputusan-keputusan yang politis. Pemerintah sebagai pihak yang menempati posisi sebagai pemegang sumber daya menggunakan kekuatan struktural dan

instrumental untuk menyusun “*rules of the game*” yang akan membawa kerugian struktural di arena politik bagi entitas berseberangan yang dalam hal ini ditempati oleh warga dan solidaritas yang tergabung dalam gerakan sosial.

Menyadari akan hal tersebut berarti juga menyadari pentingnya gerakan sosial menyusun rencana strategi yang menyasar “*rules of the game*” yang telah dibuat pemerintah dengan tujuan agar gerakan sosial tidak jatuh dalam kerugian struktural di arena politik. Di kasus Wadas, gerakan menolak tambang batu andesit oleh warga Wadas menemui banyak kebuntuan karena terbentur serangkaian peraturan yang diterbitkan pemerintah mengingat rencana tersebut menjadi satu kesatuan dengan rencana pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional.

Sebagai kebijakan yang dijalankan langsung oleh pemerintah pusat membuat struktur pemerintahan di bawahnya tidak banyak mempunyai pilihan yang bisa diambil selain ikut menyukseskan kebijakan tersebut. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah telah membuat dan menggunakan serangkaian kebijakan yang digelar sebagai “karpas merah” agar kebijakan tersebut dapat dijalankan tanpa adanya halangan yang berarti. Langkah seperti *judicial review* merupakan upaya preventif untuk mitigasi yang bisa digunakan gerakan untuk memperkecil peluang gerakan jatuh dalam kerugian dalam arena politik yang lebih dalam. Pola aksi-refleksi-aksi juga harus tetap digunakan gerakan sosial dalam mengikuti dinamika yang ada demi menjaga gerakan agar tidak mati di tengah perjuangannya.

Terakhir, untuk penelitian selanjutnya dirasa dapat secara spesifik melakukan analisis yang lebih mendalam perihal interaksi gerakan sosial

dengan agenda pemerintah yang mengakibatkan perampasan lahan bagi masyarakat terdampak. Bergesernya pola aktor yang sebelumnya ditempati korporasi menjadi oleh pemerintah memunculkan kebutuhan akan formulasi gerakan yang menggunakan perspektif yang lebih meluas dengan tetap memperhatikan kondisi internal gerakan itu sendiri.